

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 1. Keadilan dan Kesetaraan Gender

##### a. Pengertian gender

Gender dalam kamus bahasa Inggris yang berarti “jenis kelamin atau seks”.<sup>1</sup> Gender dalam ejaan bahasa Indonesia adalah jender. Sedangkan istilah gender menurut *The Contemporary English-Indonesian Dictionary* diartikan sebagai “penggolongan menurut jenis kelamin”.<sup>2</sup> Sedangkan dalam *Webster College Dictionary*, gender: “One of the categories in such a set, as masculine, feminine, neuter, or common”.<sup>3</sup>

Di dalam *Encyclopedia Feminisme* dijelaskan bahwa jender adalah kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural ada pada laki-laki atau perempuan.<sup>4</sup> Di dalam *Women’s Studies Encyclopedia* yang dijelaskan bahwa jender adalah suatu konsep kultural yang berupaya memuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara pria dan wanita yang berkembang dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa seks lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologis seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Seks atau jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender lebih berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologi, dan aspek-aspek non

---

<sup>1</sup> John M. Echols dan Hassan Syadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet XII, (Jakarta: Gramedia, 1983), hal. 265.

<sup>2</sup> Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 1996), hal 771.

<sup>3</sup> Random House, *Webster College Dictionary*, (New York Toronto London Sydney Auckland, 2001), hal 511.

<sup>4</sup> Muhdirahayu (terj), *Dictionary of Feminist Theories*, (Jogjakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hal. 177.

<sup>5</sup> Hellen Tierney (ed), *Women’s Studies Inclopedia*, vol I, (New York: Green Word Press), hal. 153.

biologis lainnya. Gender ini digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Gender menjelaskan semua atribut, peran dan kegiatan yang terkait dengan “menjadi laki-laki” atau “menjadi perempuan “.<sup>6</sup>

Jadi gender dan seks atau jenis kelamin sangat berbeda sekali, karena seks atau jenis kelamin bersifat alamiah, sedangkan gender peran dan fungsinya dibentuk oleh keadaan masyarakat, sosial dan budaya.

Munculnya peran laki-laki dan perempuan dapat saling berganti. Dalam arti, perempuan tidak hanya berperan domestik, melainkan juga berperan publik. Laki-laki bukan hanya berperan publik, tetapi juga berperan domestik.

Menurut Mansur Fakih, konsep gender adalah suatu sifat yang melekat kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural, misalnya perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain.

Dalam Al Qur'an tidak ditemukan kata yang sepadan dengan istilah gender akan tetapi kata kunci yang dapat dipegang untuk mengetahui ayat-ayat gender ialah semua istilah yang sering digunakan untuk menyebut laki-laki dan perempuan seperti kata *al-rijal* (الرجال) dan *an-nisa'* (النساء), *al-zakar* (الذكر) dan *al-untsa* (الأُنثى). Dalam mengungkapkan masalah tertentu Al Qur'an konsisten memakai istilah-istilah khusus. Seperti aspek biologis Al Qur'an sering menggunakan istilah *al-dzakar/male* untuk laki-laki dan *al-*

---

<sup>6</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Jakarta: Teraju, 2004), hal. 62.

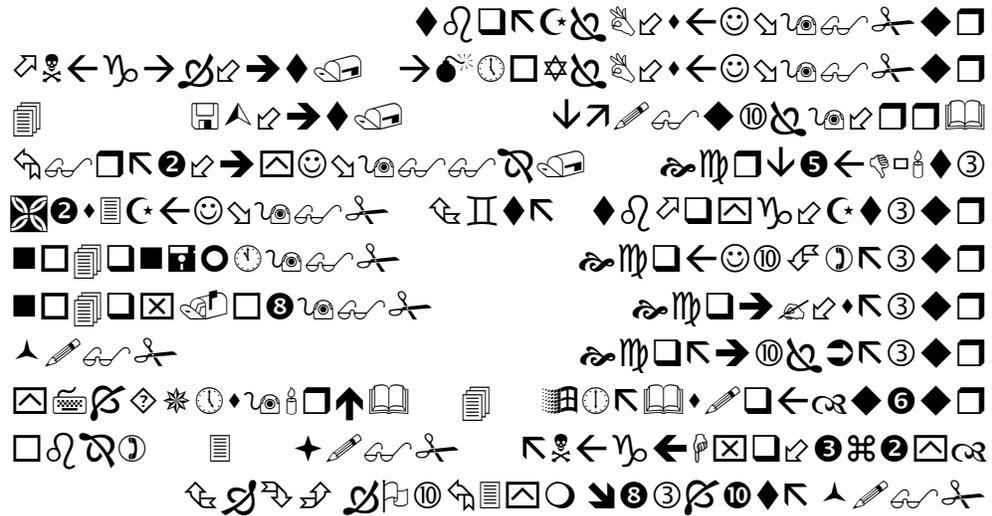
*untsa/female* untuk perempuan. Sementara dalam aspek gender Al Qur'an sering menggunakan istilah *al-rojul/ al-rijal* untuk menyebut jenis kelamin laki-laki dan *al-mar'ah/al-nisa* untuk menyebut jenis kelamin perempuan.

Table Perbedaan Seks dan Gender<sup>7</sup>.

No	Karakteristik	Seks	Gender
1	Sumber pembeda	Tuhan	Manusia (masyarakat)
2	Visi, misi	Kesetaraan	Kebiasaan
3	Unsur pembeda	Biologis (alat reproduksi)	Kebudayaan (tingkah laku)
4	Sifat	Kodrat, tertentu, tidak dapat dipertukarkan	Harkat, martabat dapat dipertukarkan
5	Dampak	Terciptanya nilai-nilai kesempurnaan, kenikmatan, kedamaian dll. sehingga menguntungkan kedua belah pihak.	Terciptanya norma-norma/ ketentuan tentang "pantas" atau tidak pantas" laki-laki pantas menjadi pemimpin, perempuan pantas dipimpin dan lain-lain, yang sering merugikan salah satu pihak, kebetulan adalah perempuan
6	Keberlakuan	Sepanjang masa, dimana saja, tidak mengenal perbedaan kelas	Dapat berubah, musiman dan berbeda antar kelas

Secara kodrat, memang diakui adanya perbedaan (*distinction*), bukan pembedaan (*discrimination*) antara laki-laki dengan perempuan, misalnya dalam aspek biologis, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan yang selanjutnya bersifat komplementer, saling mengisi dan melengkapi, seperti yang disebutkan dalam Al Qur'an berikut:

<sup>7</sup> Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang: Umm Press. 2006), hal. 6.



Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Taubah/9:71)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa laki-laki dan perempuan seyogyanya melakukan kerja sama dalam *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Maka sesuai dengan ayat itu, Islam tidak memisahkan antara kerja publik dan domestik.<sup>8</sup> Al Qur'an sebagai dasar utama dalam agama Islam, dipakai dasar rujukan seluruh kaum muslim dalam memperoleh petunjuk bimbingan, dan berkewajiban untuk mengamalkannya. Namun Al Qur'an tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan ilmu-ilmu bantu di dalam memahaminya. Di antara ilmu bantu tersebut adalah tafsir.

Kitab Al Qur'an sering kali menggunakan bahasa simbolik (*majazi*) yang memungkinkan menerima makna lebih dari satu macam, yang mungkin tidak berlaku sepanjang zaman. Bahasa simbolik ini perlu diinterpretasikan secara kreatif agar sesuai dengan konteks perkembangan zaman, termasuk didalamnya penafsiran ayat-ayat gender.

---

<sup>8</sup> Istibsyaroh, *op.cit.* hal. 3.

b. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Kajian gender lebih memperhatikan pada aspek maskulinitas (*masculinity*) atau feminitas (*feminity*) seseorang<sup>9</sup>. Peran gender tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan identitas dan berbagai karakteristik yang diasumsikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan sebab terjadinya ketimpangan status antara laki-laki dan perempuan lebih dari sekedar perbedaan fisik biologis tetapi segenap nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat turut memberikan andil.<sup>10</sup>

Perbedaan jenis kelamin melahirkan perbedaan gender dan perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan. Faktor yang menyebabkan ketidakadilan gender adalah akibat adanya gender yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya. Ketidakadilan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya hak-hak dasar manusia bagi perempuan atau laki-laki. Hak yang dimaksud adalah hak untuk menentukan diri sendiri secara mandiri.

Ada beberapa definisi tentang keadilan dan kesetaraan gender yang diberikan oleh para penulis. Secara bahasa “keadilan” berasal dari kata dasar “adil” (*just, fair, equitable, legal*)<sup>11</sup> yang berarti berpihak pada yang benar dan berpegang pada kebenaran, atau sifat, perbuatan dan perlakuan yang adil. Dalam kamus bahasa Indonesia kata “adil” yang berarti sama berat, tidak

---

<sup>9</sup> Waryono Abdul G. dan Muh. Isnanto (*eds*), *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Jogjakarta, PSW UIN SUKA dan IISEP, 2004), hal. 8.

<sup>10</sup> Narasudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Alqur'an*, (Jakarta: Paramadina. 1999), hal.75.

<sup>11</sup> John M. Echols & Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2003), hal. 4.

berat sebelah, tidak memihak. Sedangkan keadilan berarti sifat yang adil.<sup>12</sup> “Kesetaraan” berasal dari kata “setara” (*matcahing, equal*) berarti sejajar (sama tingginya), sepadan, dan seimbang.<sup>13</sup>

Jadi keadilan gender berarti suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Sedangkan kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia.

Sedangkan keadilan dan kesetaraan gender yaitu terciptanya kesamaan kondisi dan status laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar sama-sama berperan aktif dalam pembangunan. Dengan kata lain, penilaian dari penghargaan yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan serta pelbagai peran mereka.<sup>14</sup>

Keadilan gender mengantar perempuan dan laki-laki menuju kepada kesetaraan di mana kesamaan kondisi dan status untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Ketidakadilan gender yang tersosialisasi kepada kaum laki-laki dan perempuan secara mantap akan mengakibatkan ketidakadilan tersebut merupakan kebiasaan dan akhirnya dipercaya bahwa peran gender itu seolah-olah merupakan kodrat dan akhirnya diterima masyarakat secara umum. Hal

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Edisi ketiga), hal. 8.

<sup>13</sup> *Ibid.* hal. 1143.

<sup>14</sup> Hamdanah, *Musim Kawin di Musim Kemarau; Studi Atas Pandangan Ulama Perempuan Jember Tentang Hak-Hak*. (Jogjakarta: BIGRAF Publishing, 2005), hal. 249.

ini disebabkan karena terdapat kesalahan atau kerancuan makna gender. Karena pada dasarnya gender yang merupakan konstruksi sosial, justru dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan Tuhan. Misalnya pekerjaan domestik, seperti merawat anak, merawat rumah sangat melekat dengan tugas perempuan, yang akhirnya dianggap kodrat. Padahal sebenarnya pekerjaan tersebut adalah konstruksi sosial yang dibentuk, sehingga dapat dipertukarkan atau dapat dilakukan baik laki-laki maupun perempuan.

Faktor-faktor yang melanggengkan ketidakadilan gender adalah

- a. Budaya patriarki
- b. Sistem ekonomi
- c. Sistem kepercayaan/ penafsiran agama/agama
- d. Adat sosial
- e. Sistem politik
- f. Sistem pendidikan<sup>15</sup>

Sesungguhnya perbedaan gender (*gender different*) tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) Namun persoalannya tidaklah sesederhana yang dipikirkan, ternyata perbedaan gender tersebut telah melahirkan berbagai ketidakadilan baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem itu.<sup>16</sup> Guna memahami bagaimana perbedaan gender telah berakibat pada ketidakadilan gender tersebut dapat dipahami melalui berbagai manifestasi ketidakadilan tersebut diantaranya yaitu

1. Proses marginalisasi dan pemiskinan terhadap kaum perempuan
2. Subordinasi pekerjaan kaum perempuan
3. Stereotip atas pekerjaan perempuan

---

<sup>15</sup> Mansur Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 21.

<sup>16</sup> Trisakti Handayani dan Sugiarti. *op.cit* . hal. 15.

4. Kekerasan terhadap perempuan
5. Beban kerja lebih berat.<sup>17</sup>

Misalkan kondisi tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri yang pasti tidak mempunyai daya tawar karena bekal pendidikan yang rendah. Dalam data statistik tahun 2007 tercatat tenaga kerja perempuan Indonesia di luar negeri berjumlah 70% yang sebagian besar berusia muda dibawah 30 tahun dengan bekal pendidikan tidak tamat SD dan SMP.

Perempuan, bukan menerima saja kenyataan hidup. Kesalahan utama yang dilakukan para politisi, peneliti dan kaum feminis, adalah mereproduksi struktur patriarki dengan menekankan wacana ketimpangan gender, perempuan sebagai makhluk lemah, tergantung dan halus.<sup>18</sup> Dengan kata lain, melacak akar persoalan pendidikan berbias gender dimulai di keluarga, dilanjutkan di dunia pendidikan. Proses pembangunan terbukti telah memarginalkan perempuan. Proses marginalisasi ini berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan atau penafsiran ajaran agama, tradisi kebiasaan dan bahkan dari asumsi ilmu pengetahuan.<sup>19</sup>

Usaha yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender nampaknya bukan hanya sekedar bersifat individual, namun harus secara bersama dan bersifat institusional, utamanya dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan kekuasaan dan memegang peran dalam proses pembentukan gender. Untuk itu peranan pembuat kebijakan dan perencanaan pembangunan menjadi sangat penting dan menentukan arah perubahan menuju kesetaraan gender atau dapat dikatakan bahwa negara atau pemerintah mempunyai peran/ andil dalam mewujudkan keseimbangan

---

<sup>17</sup> Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Modul Pelatihan KKG Bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan*, (Jakarta: Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, 2009), hal. 41-42.

<sup>18</sup> Paulus Mujiran, *Pernik-Pernik Pendidikan, Manifestasi dalam Keluarga, Sekolah dan Penyadaran Gender*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 142.

<sup>19</sup> *Ibid.* hal. 207.

gender.<sup>20</sup> Dalam setiap perencanaan pembangunan, gender hendaknya dijadikan sebagai “kata kunci” dalam memahami kegiatan apa yang dilakukan laki-laki dan perempuan?, Berapa banyak waktu yang diperlukan untuk kegiatan tersebut?, Siapa yang memutuskan? dan sebagainya.

Terwujudnya kesetaraan gender dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dengan demikian mereka memiliki (APKM) akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan. Kebijakan pemerintah tentang gender harus disosialisasikan pada aspek pembangunan misalkan pendidikan, budaya, ekonomi, politik dan lain-lain.

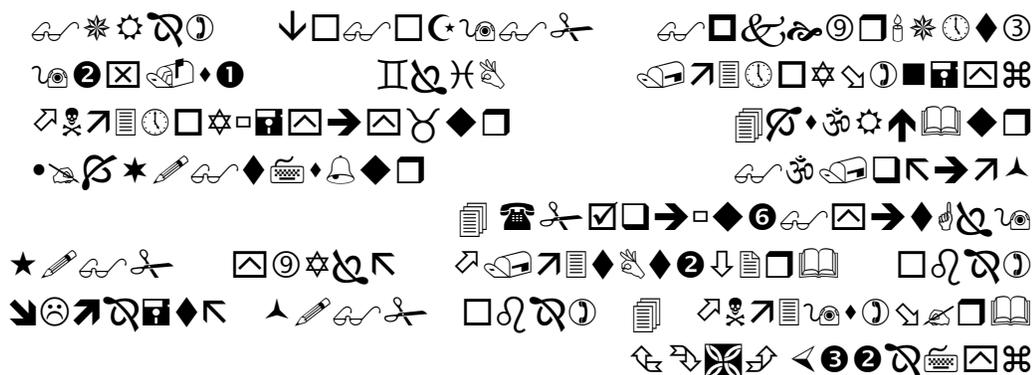
Prinsip Al Qur'an tentang kesetaraan gender terbukti berdasarkan pada dua kenyataan; *Pertama*, Al Qur'an menetapkan standar perilaku yang sama bagi laki-laki maupun perempuan dan menerapkan standar penilaian yang sama bagi keduanya; artinya, Al Qur'an tidak mengaitkan agensi moral dengan jenis kelamin tertentu. *Kedua*, Al Qur'an menyebut laki-laki dan perempuan sebagai penuntun dan pelindung satu sama lain, dengan menyebutkan bahwa keduanya mampu mencapai individualitas moral dan memiliki fungsi penjagaan yang sama terhadap satu sama lain<sup>21</sup>.

Senada dengan firman Allah SWT

---

<sup>20</sup> Trisakti Handayani dan Sugiarti. *op. cit.* hal. 11.

<sup>21</sup> Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 2003), hal. 250.



Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.  
22

c. Kebijakan dalam Pendidikan yang Berkeadilan dan Kesetaraan Gender

Dalam dunia pendidikan konsep gender terus bergulir untuk mencapai keseimbangan peran dan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Namun hal itu tidak semulus harapan, disebabkan oleh budaya, pandangan dan ideologi patriarki, sehingga kecerdasan intelektual yang dimiliki perempuan sangat kurang dibandingkan laki-laki.<sup>23</sup> Di bidang pembangunan pendidikan, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi dan efesiensi manajemen kebijakan. Pada bidang pembangunan pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional telah menyusun kebijakan Nasional yaitu Pengarusutamaan gender (Inpres no 9 tahun 2000) dengan fokus utama untuk mengatasi kesenjangan gender di bidang pendidikan. Selain itu didukung oleh Deklarasi Universal HAM pada pasal 26

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART. 2004), hal. 544.

<sup>23</sup> Nur Chayati, Sekolah dan Spectrum Kesetaraan Gender, Aplikasi Androgini dan Kritik Proses Pembelajaran Di Sekolah, *Edukasi* vol II (No 2 Desember 2004), hal 196.

Pemerintah melalui Instruksi presiden No 9 tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 tahun 2003 menetapkan pengarusutamaan gender sebagai strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pengintegrasian KKG dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Suatu kebijakan publik dipandang berspektif gender apabila:

1. Tujuan atau sasaran kebijakan telah ditetapkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
2. Berdasarkan atas analisis situasi berdasarkan data terpilih menurut jenis kelamin
3. Menetapkan indikator-indikator gender pada setiap kebijakan pembangunan.
4. Menetapkan rencana aksi yang ditujukan untuk mengurangi/menghilangkan kesenjangan gender.
5. Dengan demikian suatu kebijakan pendidikan dikatakan berkualitas baik dalam perspektif gender apabila menetapkan tujuan/sasaran untuk memperkecil kesenjangan gender di bidang pendidikan.<sup>24</sup>

Kualitas kebijakan pendidikan dikategorikan dalam tiga klasifikasi yaitu netral gender, potensial bias gender, dan responsif gender. Suatu kebijakan dikatakan responsif gender apabila kebijakan/ program/ kegiatan tersebut sudah memperhitungkan kepentingan laki-laki dan perempuan. Suatu kebijakan dikatakan netral gender apabila kebijakan/ program tersebut tidak memihak pada salah satu jenis kelamin. Suatu kebijakan dikatakan berpotensi bias gender apabila kebijakan/ program tersebut terkesan netral gender, tetapi berpotensi untuk diimplementasikan secara bias gender (merugikan salah satu jenis kelamin)<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, *Reformasi Kebijakan Pendidikan Menuju Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Surakarta: LPP UNS Press, 2009), ha. 135.

<sup>25</sup> *Ibid.* hal. 15.

Komponen kunci keberhasilan integrasi perspektif gender dalam kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh empat hal, yaitu kapasitas Sumber Daya Manusia, *capacity building*/ advokasi, budaya organisasi, jejaring serta kemitraan antar pihak yang berkompeten terhadap kesetaraan dan keadilan gender.

d. Lembaga Pendidikan Yang Responsif Gender.

Salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah faktor pendidikan, sehingga sektor pendidikan memegang peranan yang sangat strategis di dalam membentuk sumber daya manusia yang produktif, inovatif dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakatnya. Proses pendidikan tidak saja memberikan nilai kognitif dan ketrampilan kepada manusia, tetapi melalui pendidikan juga dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai yang seyogyanya dimiliki oleh seseorang manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap warganegara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hak, kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pendidikan.

Perspektif gender dalam pendidikan dapat dilihat dari tiga parameter: (1) hak, (2) keadilan dan (3) kesetaraan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang harus menjadi cara pandang kita semua sebagai warga negara, terlebih bagi penyelenggara pendidikan di pusat dan di daerah. Sebab pendidikan itu dari, oleh dan untuk manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, sehingga masalah pendidikan harus dikembalikan pada akar Hak Asasi Manusia.<sup>26</sup>

Salah satu bentuk pendidikan dalam kebijakan tersebut adalah sekolah maupun madrasah yang responsif gender dalam pembelajaran. Pembelajaran responsif gender adalah pembelajaran yang mengakui dan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, minat pengalaman, dan cara

---

<sup>26</sup> Ahmad Darsono S, "Pendidikan Perempuan Warga Miskin di Daerah Tertinggal" *Jurnal Perempuan*, 59 Cet 1 (Mei, 2008), hal. 65.

belajar murid perempuan dan laki-laki yang disebabkan oleh konstruksi gender pada lingkungan melalui proses pembelajaran merupakan bagian terpenting dari keberadaan sekolah. Proses ini menjadi media transfer dari berbagai misi yang diemban oleh sekolah, termasuk didalamnya sosialisasi kebudayaan masyarakat. Dalam hal ini, guru dan sekolah agar menanamkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender pada pembelajaran.

Agar aksi keadilan dan kesetaraan gender dapat berjalan, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan oleh guru:<sup>27</sup> *Pertama*, Mempunyai wawasan yang cukup tentang kesetaraan gender. Dengan wawasan yang cukup tentang kesetaraan gender seorang guru diharapkan mampu untuk bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik perempuan maupun laki-laki.

*Kedua*, Tindakan dan sikap anti diskriminasi gender. Dalam hal ini, seorang guru tidak hanya dituntut untuk memahami secara tekstual arti dan nilai-nilai keadilan gender tetapi dia juga dituntut untuk mampu mempraktekkan nilai-nilai tersebut secara langsung di kelas atau di sekolah.

*Ketiga*, sensitif terhadap permasalahan gender. Seorang guru harus sensitif dalam melihat adanya diskriminasi dan ketidakadilan gender di dalam maupun di luar kelas. Apabila ada kejadian yang mengindikasikan adanya diskriminasi gender yang dilakukan oleh satu atau beberapa murid, seorang guru harus mampu mencegah dan sekaligus memberikan pemahaman bahwa tindakan mereka itu adalah tindakan yang diskriminatif.

Sebagaimana hadis Nabi perintah berbuat adil dari An-Nu'man bin Basyir dia menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda

عن النعمان بن بشير قال تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فا نطلق ابي الى النبي صلى الله

---

<sup>27</sup> M. Ainul Yakin, *Pendidikan Multikultural, Cross-Cultural Understanding Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pilar Media. 2007), hal. 133-134.

عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم فرجع ابي فرد تلك الصدقة<sup>28</sup>

Dari Nu'man bin Basyir r.a berkata: Bapak saya telah memberikan kepada saya sebahagian hartanya (yaitu sahaya tadi) berkata Ibuku Umrah bint Rawahah: saya tidak rela sebelum disaksikan Rasulullah s.a.w maka pergilah bapak saya kepada beliau untuk mempersaksikan pemberiannya kepada saya itu. Berkata Rasulullah s.a.w: apakah pekerjaanmu itu telah meratai masing-masing anakmu, jawab bapak: tidak, rasulullah bersabda bertaqwalah kepada Allah dan berbuat adillah pada anak-anak kalian, maka pulanglah bapak saya lalu menarik kembali pemberian itu.<sup>29</sup>

Sementara itu, disamping peran guru, sekolah juga mempunyai peran gender yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai tentang kesetaraan dan keadilan gender. Ada beberapa hal dasar yang harus diperhatikan dan sekaligus penting untuk dipraktekkan oleh sebuah institusi pendidikan agar dapat berperan secara maksimal dalam membangun kesadaran siswa tentang kesetaraan dan keadilan gender di sekolah. Diantaranya yaitu; *Pertama*, sekolah harus mempunyai sekaligus menerapkan Undang-Undang sekolah yang salah satu isinya melarang keras adanya diskriminasi gender di sekolah atau kampus. Dengan diterapkannya Undang-Undang sekolah diharapkan dapat membangun karakter siswa, yang disamping taat hukum, juga dapat belajar untuk selalu menjaga dan menghormati hak-hak individu yang lain.

*Kedua*, sekolah harus berperan aktif untuk memberikan pelatihan gender terhadap seluruh karyawan, guru, murid, staf administrasi, anggota yayasan dan seluruh penghuni sekolah lainnya. Ini dimaksudkan agar penanaman nilai-nilai tentang persamaan hak dan sikap anti diskriminasi gender dapat berjalan dengan efektif.

*Ketiga*, untuk memupuk dan menggugah kesadaran siswa tentang pentingnya sikap yang menjunjung tinggi hak-hak, kesetaraan peran, dan sikap anti diskriminasi terhadap kaum perempuan, maka pihak sekolah dapat

<sup>28</sup> Kitab *Sahih Muslim*, Juz 2, (Semarang: Pustaka Keluarga), hal. 7.

<sup>29</sup> Razak dan Rais Lathief, *Tarjamah Hadis Shahih Muslim juz 2*, (Jakarta: Al-Husna, 1980), hal. 277.

mengadakan acara-acara seminar atau kegiatan sosial lainnya yang berkaitan dengan pengembangan kesetaraan gender dan keadilan gender.<sup>30</sup>

Selain itu buku ajar siswa yang mendukung dalam keadilan dan kesetaraan gender. Buku-buku ajar yang dijadikan literatur pendidikan baik tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA memuat nilai dan peran gender. Contoh klasik mengenai sosialisasi gender melalui buku ajar diantaranya sebagai berikut. “Ibu memasak di dapur, bapak membaca Koran”. Ibu berbelanja di pasar, bapak mencangkul di sawah”. Bentuk seksisme lain; gambar-gambar lebih sering menampilkan anak laki-laki jika dibandingkan dengan anak perempuan dan dalam kegiatan yang lebih bervariasi.

Supaya persoalan dalam buku ajar agama Islam dapat dipahami sebagai teks yang mencerminkan kesetaraan gender, maka perlu rekonstruksi teks kesetaraan gender.<sup>31</sup> Selama proses pembelajaran yang terkait pada tiga komponen yaitu materi, metode dan hasil/penilaian pembelajaran. Materi dalam proses pendidikan agama Islam harus didudukkan sebagai bahan kurikulum dalam pendidikan Islam yang bersumber dari teks agama dan pemahaman terhadap teks tersebut. Teks sebagai sumber materi dapat diambil melalui Al-Qur’an-Hadis sebagai sumber utama.

Dalam memberikan metode pembelajaran yang memiliki potensi tanpa melakukan pembedaan seks dalam proses belajar mengajar. Ada 3 hal bentuk pembelajaran pendekatan persepektif gender yaitu:

a. Pembelajaran bias gender.

Pembelajaran adalah proses interaktif peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar.<sup>32</sup> Sedangkan bias gender adalah

---

<sup>30</sup> M. Ainul Yakin *op. cit.* hal. 134.

<sup>31</sup>Erni Purwati, Dekonstruksi Teks Bias Gender, Interpretasi Buku-Buku Ajar Agama Islam Tingkat SD, SMP, dan SMA, *ISTiQRO'' Jurnal Penelitian Islam Indonesia*, V III, ( No 01, 2004), hal. 163.

<sup>32</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Islam RI, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*, 2006, hal. 7.

suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan pembangunan.<sup>33</sup> yang bias gender adalah penerapan pembelajaran yang didalamnya dalam proses belajar mengajar memihak antara laki-laki dan perempuan dalam peran pembelajaran yang tidak seimbang.

b. Pembelajaran Netral Gender

Pembelajaran yang netral gender adalah pembelajaran yang menguntungkan laki-laki dan perempuan menjunjung tinggi keadilan bagi keduanya

c. Pembelajaran Inklusif Gender

adalah pembelajaran yang bersifat terbuka bagi laki-laki dan perempuan serta peranannya yang menguntungkan bagi keduanya.

2. Integrasi nilai-nilai KKG pada pembelajaran Al-Qur'an-Hadis

a. Pengertian Integrasi.

Integrasi dari kata “integrate” dalam kamus bahasa Inggris ‘*Combine two or more things so that they work together, to combine with sth else in this way*’.<sup>34</sup> Dengan integrasi di maksud perpaduan, koordinasi, kebulatan dan keseluruhan<sup>35</sup>. Pengintegrasian berarti memadukan, menggabungkan dan menyatukan antardisiplin ilmu.

Integrasi ini tercapai dengan memusatkan pelajaran pada masalah tertentu yang memerlukan pemecahannya dengan bahan dari berbagai disiplin atau mata pelajaran yang diperlukan. Bahkan mata pelajaran menjadi instrument dan fungsional untuk

---

<sup>33</sup> Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *op. cit.* hal. 38.

<sup>34</sup> Sally Wehmeier (ed), *Oxford Advanced Learners's Dictionary*, (Oxford University Press: 2001), hal. 675.

<sup>35</sup> Nasution, *Azaz-Azaz Kurikulum*, ( Jakarta: Bumi Aksara. 1995), hal. 195.

memecahkan masalah itu. Oleh karena itu batas-batas antara mata pelajaran dapat ditiadakan.<sup>36</sup>

Jadi Integrasi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender pada pembelajaran Al-Qur'an-Hadis adalah menyatukan atau menggabungkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender pada proses pembelajaran Al-Qur'an-Hadis.

Misalnya, pada saat pembelajaran Al-Qur'an materi *berkompetensi dalam kebaikan An-Nahl ayat: 97*, mempelajari ayat tersebut memahami secara tekstual dan kontekstual serta menggabungkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender bahwa “ Materi yang disampaikan berkompetensi keadilan dan kesetaraan gender, ilustrasi bahasa misalnya; Laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama berkompetensi dalam kebaikan contoh laki-laki dan perempuan bersama-sama meraih prestasi, bercita-cita sesuai kemampuan dirinya, laki-laki dan perempuan aktif dalam berorganisasi kepemudaan karang taruna, laki-laki dan perempuan menjadi guru/ dosen. Dalam penggunaan metode pembelajaran yaitu metode diskusi yang melibatkan siswa laki-laki dan perempuan serta bebas mengemukakan pendapat, menghargai perbedaan pendapat, serta guru memberikan penjelasan point-point yang didiskusikan tentang menjelaskan kompetensi laki-laki dan perempuan dilingkungan kehidupan sehari-hari, siswa mendiskusikan tokoh laki-laki dan perempuan yang berpengaruh pada pendidikan. Tahap selanjutnya guru mengevaluasi atau memberikan latihan-latihan soal pilihan ganda dan esai yang didalamnya terkait persoalan laki-laki dan perempuan dalam berkompetensi”.

---

<sup>36</sup> Abdul Muhibin, dan Jusuf Mudzakkar, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), hal. 161.

b. Komponen Pembelajaran Al-Qur'an-Hadis kelas XI

Kurikulum pada tingkat madrasah merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan masing-masing madrasah. Kurikulum tingkat MI hingga MA maupun MAK sesuai dengan madrasah artinya disesuaikan dengan potensi daerah atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat maupun peserta didik sendiri.<sup>37</sup> Kurikulum model pembelajaran yang dikembangkan saat ini adalah model pembelajaran berbasis KTSP.

KTSP adalah kurikulum yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.<sup>38</sup> Sedangkan muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan.

Mata pelajaran Al-Qur'an-Hadis di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran pendidikan agama Islam yang merupakan peningkatan dari Al-Qur'an-Hadis yang telah dipelajari oleh peserta didik di MTs/SMP. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian Al Qur'an dan Hadist terutama menyangkut dasar-dasar keilmuannya sebagai persiapan untuk melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi, serta memahami dan menerapkan tema-tema tentang manusia dan tanggung jawabnya di muka bumi, demokrasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Al Qur'an dan Hadits sebagai persiapan untuk hidup bermasyarakat. Secara substansial, mata pelajaran Al-Qur'an-Hadis memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan mempraktikkan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung

---

<sup>37</sup> Khaeruddin dan Mahfud Junaidi, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Konsep Dan Impelementasinya Di Madrasah*, (Semarang, Madrasah Development Center (MDC), 2007), hlm. 56.

<sup>38</sup> *Ibid.* hal. 79.

dalamnya sebagai sumber utama ajaran Islam dan sekaligus menjadi pegangan dan pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari.<sup>39</sup>

Di dalam setiap proses pembelajaran, selalu ada tiga komponen penting yang saling terkait satu sama lain. Tiga komponen penting itu adalah materi yang diajarkan, proses mengajarkan materi dan hasil dari proses pembelajaran tersebut. Ketiga aspek ini sama pentingnya karena merupakan satu kesatuan yang membentuk lingkungan pembelajaran<sup>40</sup>.

#### 1). Materi Al-Qur'an-Hadis

Dalam Permenag RI No 2 tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di madrasah untuk mata pelajaran Al-Qur'an-Hadis kelas XI terdiri dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yaitu.

#### Kelas XI, Semester I<sup>41</sup>

Standar kompetensi	Kompetensi dasar
c. Memahami ayat-ayat Al Qur'an dan Hadis nikmat dan cara mensyukurinya	a. Mengartikan QS az-Zuhruf:9-13, QS al-'Ankabut:17 dan hadis tentang syukur b. Menjelaskan kandungan QS az-zuhruf:9-13, QS al-'Ankabut:17 dan hadis tentang syukur c. Menunjukkan perilaku orang yang mengamalkan QS az-Zuhruf:9-13, QS al-'Ankabut:17 dan hadis tentang syukur d. Mengidentifikasi macam-macam nikmat Allah sebagaimana terkandung dalam QS az-Zuhruf:9-13 e. Melaksanakan cara-cara mensyukuri nikmat Allah seperti

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, No 2 tahun 2008. hal 83.

<sup>40</sup> Hamruni, *Konsep Edutainment dalam Pendidikan Islam*, (Jogjakarta : Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga. 2008), hal. 108.

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia *op. cit.* hal. 93.

	terkandung dalam QS al-‘Ankabut:17 dan hadis tentang syukur
d. Memahami ayat-ayat Al Qur’an tentang perintah menjaga kelestarian lingkungan hidup	<p>a. Mengartikan QS ar-Ruum:41-42, QS al-A’raaf:56-58; QS Shad:27; QS al-Furqaan:45-50 dan QS al-Baqarah:204-206.</p> <p>b. Menjelaskan kandungan QS ar-Ruum:41-42, QS al-A’raaf:56-58; QS Shad:27; QS al-Furqaan:45-50 dan QS al-Baqarah:204-206.</p> <p>c. Menunjukkan perilaku orang yang mengamalkan QS ar-Ruum:41-42, QS al-A’raaf:56-58; QS Shad:27; QS al-Furqaan:45-50 dan QS al-Baqarah:204-206.</p> <p>d. Menerapkan perilaku menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagaimana terkandung dalam QS ar-Ruum:41-42, QS al-A’raaf:56-58; QS Shad:27; QS al-Furqaan:45-50 dan QS al-Baqarah:204-206.</p>

Kelas XI, Semester 2<sup>42</sup>

Standar kompetensi	Kompetensi dasar
1. Memahami ayat-ayat Al Qur’an dan al-Hadis tentang pola hidup sederhana dan perintah menyantuni duafa	<p>1.1 Mengartikan QS al-Qashash: 79-82; QS al-Israa’: 26-27,29-30, QS al-Baqarah: 177 dan hadis tentang hidup sederhana dan perintah menyantuni para duafa</p> <p>1.2 Menjelaskan kandungan QS al-Qashash: 79-82; QS al-Israa’: 26-27,29-30, QS al-Baqarah: 177 dan hadis tentang hidup sederhana dan perintah menyantuni para duafa</p> <p>1.3 Mengidentifikasi perilaku orang-</p>

---

<sup>42</sup> *Ibid.* hal. 94.

	<p>orang yang mengamalkan QS al-Qashash: 79-82; QS al-Israa': 26-27,29-30, QS al-Baqarah: 177 dan hadis tentang hidup sederhana dan perintah menyantuni para duafa</p> <p>1.4 Menerapkan perilaku hidup sederhana dan menyantuni para duafa QS al-Qashash: 79-82; QS al-Israa': 26-27,29-30, QS al-Baqarah: 177 dan hadis tentang hidup sederhana dan perintah menyantuni para duafa</p>
<p>2. Memahami ayat-ayat al-Qur'an tentang berkompetisi dalam kebaikan.</p>	<p>2.1 Mengartikan QS al-Baqarah: 148; QS al-Faathir: 32 dan QS an-Nahl: 97</p> <p>2.2 Menjelaskan kandungan QS al-Baqarah: 148; QS al-Faathir: 32 dan QS an-Nahl: 97</p> <p>2.3 Menceritakan perilaku orang-orang yang mengamalkan QS al-baqarah: 148; QS al-faathir: 32 dan QS an-Nahl: 97</p> <p>2.4 Mengidentifikasi hikmah perilaku berkompetisi dalam kebaikan</p> <p>2.5 Menerapkan perilaku berkompetisi dalam kebaikan, seperti terkandung dalam QS al-Baqarah: 148; QS al-Faathir: 32 dan QS an-Nahl: 97</p>

## 2). Metode Pembelajaran

Metode yang di pilih oleh pendidik tidak boleh bertentangan dengan tujuan pembelajaran. Metode harus mendukung kemana kegiatan interaktif edukatif berproses guna mencapai tujuan. Tujuan pokok pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan anak

secara individu agar bisa menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapinya.<sup>43</sup>

Di antara berbagai metode pengajaran menurut ajaran Islam, perlu memperhatikan karakteristik situasi belajar mengajar: *pertama*, memperhatikan kondisi dan karakter murid serta faktor-faktor lingkungannya dan *kedua*, memperhatikan waktu yang tepat untuk melangsungkan kegiatan belajar mengajar sambil berusaha agar murid tidak merasa bosan.<sup>44</sup>

Suatu metode bisa dikatakan efektif jika prestasi belajar yang diinginkan dapat dicapai dengan penggunaan metode yang tepat guna. Hasil pembelajaran yang baik haruslah bersifat menyeluruh, artinya bukan hanya sekedar penguasaan pengetahuan semata-mata, tetapi juga tampak dalam perubahan sikap dan tingkah laku secara terpadu.

Proses pembelajaran yang efektif dapat terwujud melalui kegiatan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut<sup>45</sup>:

- a) Berpusat pada siswa. Dalam kegiatan proses pembelajaran, siswa merupakan subyek utama. Oleh karena itu, dalam proses ini hendaknya siswa menjadi perhatian utama dari para guru. Keberhasilan proses pembelajaran, terletak dalam perwujudan diri siswa sebagai pribadi mandiri, pelajar efektif dan pelajar produktif.
- b) Interaksi edukatif antara guru dengan siswa. Interaksi antara guru dengan siswa hendaknya berdasarkan sentuhan-sentuhan psikologis, yakni adanya saling memahami antara guru dengan siswa. Rasa percaya diri dapat ditumbuhkan dalam suasana seperti itu.

---

<sup>43</sup> Ismail SM, *Strategi Pembelajaran Agama Berbasis PAIKEM*, (Semarang: RaSAIL, 2008), hal.17.

<sup>44</sup> Abdul Fattah Jalal (ed), *Azas-Azas Pendidikan Islam*, diterjemahkan oleh Herry Noer Ali dari "Minal Ushuli At-Tarbawiyati" ( Bandung: CV. Diponegoro, 1988), hal. 185.

<sup>45</sup> Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Berbasis Integrasi dan Kompetensi)*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal.177-180.

c) Suasana demokratis. Dalam suasana demokratis, semua pihak memperoleh penghargaan sesuai dengan potensi dan prestasinya sehingga dapat memupuk rasa percaya diri, dan pada gilirannya dapat berinovasi dan berkreasi sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

d) Variasi metode mengajar. Dengan bervariasi akan menimbulkan rasa senang pada siswa, sehingga memungkinkan memperoleh hasil pembelajaran yang lebih baik.

e) Guru professional. Proses pembelajaran yang efektif hanya mungkin bisa terwujud apabila dilaksanakan oleh guru profesional dan dijiwai semangat profesionalisme yang tinggi.

f) Bahan yang sesuai dan bermanfaat. Dalam arti bahan yang diajarkan guru bersumber dari kurikulum yang telah ditetapkan secara relatif berlaku. Dengan bahan yang dirasakan sesuai dan bermanfaat atau bermanfaat, siswa akan melakukan aktifitas pembelajaran dengan bergairah.

g) Lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif adalah lingkungan yang dapat menunjang bagi pembelajaran secara efektif.

h) Sarana belajar yang menunjang. Untuk menentukan alat mana yang sesuai dan menunjang kegiatan pembelajaran, mestilah melihat tujuan, bahan, metode dan situasi mengajar.

### 3). Hasil Pembelajaran.

Tujuan pembelajaran pada hakikatnya adalah diperolehnya perubahan tingkah laku individu. Perubahan tersebut merupakan akibat perbuatan belajar. Ciri-ciri tingkah laku yang diperoleh dari hasil belajar adalah.<sup>46</sup>

---

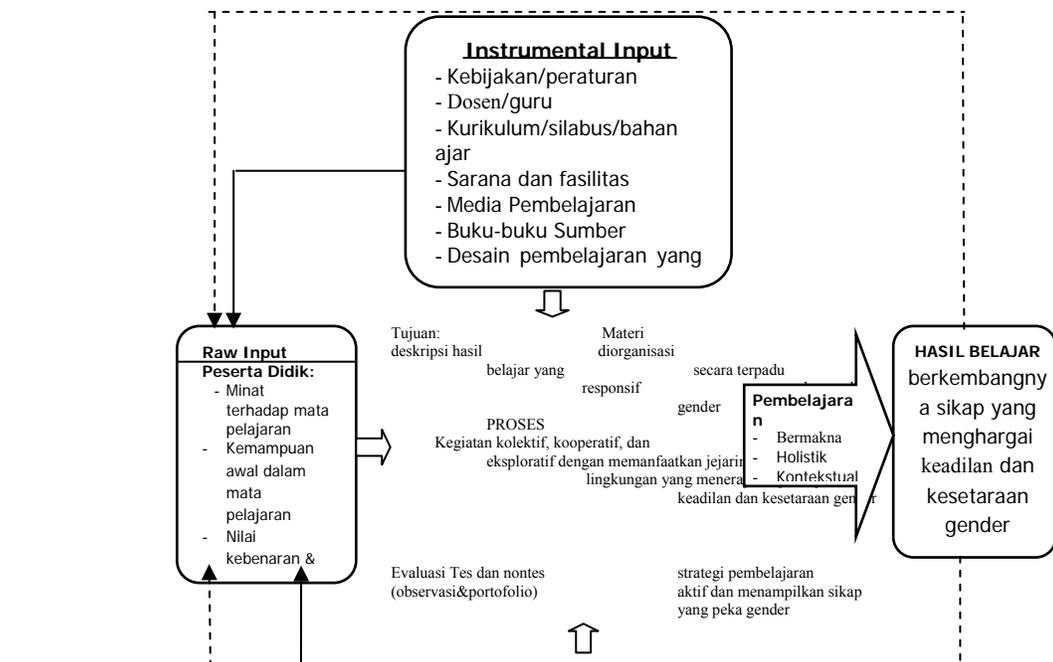
<sup>46</sup> Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, *Teknologi Pengajaran*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001). hal. 36.

- a). Terbentuknya tingkah laku baru berupa kemampuan intelektual yang diperoleh dari hasil belajar.
- b). Kemampuan baru tersebut berlaku dalam waktu yang relatif lama
- c). Kemampuan baru tersebut diperoleh melalui usaha.

3. Integrasi Nilai-Nilai Keadilan dan Kesetaraan Gender Pada Pembelajaran Al-Qur'an-Hadis.

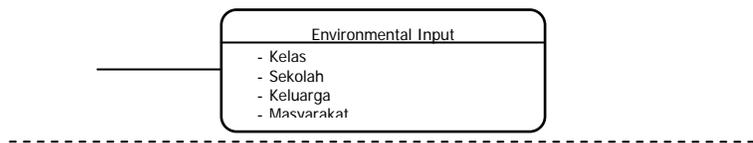
Mengapa perlunya integratif? Secara alami potensi siswa seperti inisiatif, kreatif, emosi, kecerdasan, kepercayaan/ spiritual, ketrampilan dan lainnya sesungguhnya merupakan satu kesatuan.<sup>47</sup>

DESAIN PEMBELAJARAN YANG RESPONSIF GENDER<sup>48</sup>



<sup>47</sup> Depag, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam. *Pedoman Intergrasi Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills) Dalam Pembelajaran, Madrasah Ibtidaiyyah, Madrasah Tsanawiyah*, (Jakarta, 2005), hal. 51.

<sup>48</sup> <http://idb2.wikispaces.com>. judul "Pengembangan Model Pembelajaran Responsif Gender Pada Madrasah Ibtidaiyyah di Kalimantan Selatan" hal. 21, Mengakses tanggal 28 Februari 2010.



Pembelajaran yang mengakui dan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, minat pengalaman, dan cara belajar murid perempuan dan laki-laki yang disebabkan oleh konstruksi gender pada lingkungan. Tujuannya adalah *pertama*, agar perbedaan konstruksi gender laki-laki dan perempuan sama-sama diakui dan dihargai, serta akomodatif pada keduanya untuk menciptakan kesetaraan gender yakni keduanya memperoleh akses, partisipasi kontrol dan manfaat yang sama dalam belajar. *Kedua*, Untuk mencapai keadilan gender murid laki-laki dan perempuan mendapatkan hak-hak dalam belajar secara adil, agar keduanya belajar secara aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

Sebelum menguraikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender pada pembelajaran lebih dahulu memahami indikator nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender. Nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender berupa;

1. Persamaan hak laki-laki dan perempuan
2. Perbedaan fisik laki-laki dan perempuan
3. Partisipasi laki-laki dan perempuan
4. Keadilan bagi laki-laki dan perempuan
5. Kerjasama laki-laki dan perempuan
6. Kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender pada pembelajaran dapat dilihat dari empat faktor yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM). Pada Materi pembelajaran guru dan siswa memiliki akses/kesempatan menggunakan materi yang ada, partisipasi guru dan siswa atau keaktifan dalam proses penyampaian materi, kontrol materi pembelajaran oleh siswa dan guru sebagai yang bertanggung jawab dalam proses belajar, serta

keduanya dapat mengambil manfaat dari materi tersebut atau pesan yang disampaikan dalam materi.

Pada metode pembelajaran guru dan siswa memiliki akses dalam arti metode apa yang digunakan yang dapat memberikan daya tarik bagi keduanya, dalam penggunaan metode secara bersamaan melibatkan untuk aktif selama proses pembelajaran, serta guru dan siswa bertanggung jawab atas penggunaan metode pembelajaran dan bermanfaat bagi keduanya untuk sebagai alat ukur keberhasilan selama proses pembelajaran.

Pada tahap penilaian/ evaluasi pembelajaran tes maupun non tes yang digunakan dapat diakses oleh siswa laki-laki dan perempuan dan bobot instrument tes mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender dalam arti tes tersebut untuk mengukur tingkat pemahaman atau hasil belajar bagi keduanya, secara partisipasi penilaian tersebut mampu menarik siswa untuk mengerjakan soal-soal dengan senang, secara kontrol penilaian atau hasil belajar untuk melihat sejauhmana tingkat penguasaan siswa laki-laki dan perempuan terhadap materi yang disampaikan dalam tanggungjawabnya ikut serta proses belajar mengajar, serta penilaian atau hasil belajar tersebut digunakan sebagai indikator penguasaan individu siswa dan sebagai alat analisis guru terhadap materi, metode serta alat ukur belajar siswa selama pembelajaran dikelas.

Berikut ini rancangan aspek-aspek desain model pembelajaran responsif gender yang telah diujicobakan di Kalimantan Selatan <sup>49</sup>.

No	Komponen	Indikator
1	Merumuskan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar	a. Tujuan dirumuskan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan tafsiran ganda. b. Tujuan dirumuskan secara terpadu dan seimbang antara kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor yang mengacu pada hasil belajar

<sup>49</sup> *Ibid.* hal. 19.

		yang responsif gender
		c. Tujuan dinyatakan secara lengkap, dengan memenuhi audience, behavior, condition, degree yang menggambarkan responsif gender.
		d. Tujuan dirumuskan secara berurutan, logis, dari yang mudah ke yang sukar, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari ke yang konkret ke yang abstrak, dari ingatan hingga evaluasi
2	Mengembangkan dan mengorganisasi materi pelajaran	a. Keluasan dan kedalaman materi memenuhi kebutuhan gender.
		b. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa yang menggambarkan kesetaraan dan keadilan gender.
		c. Materi dijabarkan secara sistematis (berurutan dari yang sederhana-kompleks, mudah-rumit, konkret-abstrak).
		d. Kemutakhiran (keseuaian dengan perkembangan terakhir dari materi yang dibahas dengan konteks social
3	Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran	a. Gambar-gambar yang responsif gender
		b. Model asli yang responsif gender
		c. Media cetak dan elektronik
4	Memilih sumber belajar (nara sumber, buku paket dan pelengkap, lingkungan, laboratorium, dll)	a. Kesesuaian sumber dengan tujuan yang menggambarkan responsif gender.
		b. Kesesuaian sumber dengan perkembangan siswa dengan memperhatikan kebutuhan dan keadilan gender
		c. Kesesuaian sumber dengan materi responsif gender yang akan disesuaikan
		d. Kesesuaian sumber dengan lingkungan siswa yang peka gender
5	Menentukan jenis kegiatan pembelajaran (penjelasan guru, observasi, diskusi, belajar kelompok, percobaan, membaca, dll)	a. Sesuai tujuan (yang menggambarkan responsif gender)
		b. Sesuai dengan bahan yang akan diajarkan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
		c. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa secara setara gender
		d. Sesuai dengan waktu yang tersedia

		e. Sarana dan fasilitas
		f. Bervariasi
		g. Memungkinkan keterlibatan siswa yang adil gender.
6	Menyusun langkah-langkah pembelajaran	a. Kegiatan pembukaan (menggambarkan tindakan dan perlakuan yang responsif gender)
		b. Kegiatan inti (menggambarkan tindakan dan perlakuan yang responsif gender)
		c. Kegiatan penutup (menggambarkan tindakan dan perlakuan yang responsif gender)
7	Menentukan alokasi waktu pembelajaran	Alokasi waktu yang proposional pada setiap langkah pembelajaran
8	Menentukan cara-cara memotivasi siswa	a. Mempersiapkan bahan pengait yang menarik bagi siswa secara adil gender
		b. Mempersiapkan media yang responsif gender
		c. Menetapkan jenis kegiatan yang menarik.
		d. Melibatkan siswa secara merata dalam kegiatan
9	Menyiapkan pertanyaan	Pertanyaan yang menuntut kemampuan untuk: mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi
10	Menentukan penataan ruang dan fasilitas belajar	a. Sesuai dengan tingkat perkembangan siswa.
		b. Sesuai dengan jenis kegiatan.
		c. Sesuai dengan waktu.
		d. Sesuai dengan lingkungan.
11	Menentukan cara-cara pengorganisasian agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran	a. Pengaturan pengorganisasian (individu, kelompok, klasikal) dengan memperhatikan kebutuhan gender.
		b. Penyebaran tugas dengan memperhatikan kebutuhan dan keadilan gender.
		c- Penjelasan alur dan cara kerja dengan memperhatikan kebutuhan dan keadilan gender.
		d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas.
12	Menentukan prosedur dan jenis penilaian	a. Prosedur: penilaian awal, tengah (dalam proses) dan akhir.
		b. Jenis: lisan, tertulis, dan perbuatan.

Aspek-aspek pembelajaran dikembangkan mulai tahap perencanaan. Proses belajar mengajar yang meliputi kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup, sumber belajar, penggunaan metode serta evaluasi.

Jadi guru mapel Al-Qur'an-hadis mengembangkan silabus berdasarkan Permenag dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta perencanaan mengajar berupa RPP dengan pendekatan gender.

Integrasi KKG pada materi Al-Qur'an-Hadis adalah dengan menggabungkan unsur-unsur nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender pada materi yaitu berupa penjelasan materi Al-Qur'an-Hadis dengan pendekatan responsif gender. Misalkan pada materi *berkompetensi dalam kebaikan dalam surat al-Baqarah: 148, al-Fathir ayat 32 dan al Nahl ayat 97*. Materi dijabarkan secara sistematis dari hal yang sederhana-kompleks, mudah-rumit, konkrit-abstrak.

Ketika integrasi berhasil dilakukan, perspektif anti bias menjadi filter melalui mana guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh materi, aktifitas dan interaksi dengan siswa, orang tua dan staf. Belajar tentang perbedaan dan persamaan merembes dalam semua aktifitas, dan pada gilirannya akan menjadi sikap hidup guru, siswa, orang tua dan masyarakat<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup> Zakiyuddin Baidhaw, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (PT. Gelora Aksara Pratama, 2005), hal. 96.

